

RINGKASAN

ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN DESA SUKOREJO KPH WILAYAH XIII LAKITAN BUKIT COGONG KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS.
(Skripsi oleh Rista Olymvia dibawah bimbingan Dr. Ir. Ahyauddin, S.TP., M.P. dan Maria Ulfa, S.Hut., M.Si.)

Keberadaan hutan selalu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat disekitarnya. Dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menambah penghasilan, masyarakat mengambil manfaat dari hutan sebesar-besarnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Salah satu manfaat dari adanya skema hutan desa adalah menjadikan masyarakat desa sebagai pengelola kawasan hutan desa dan diharapkan dapat menyejahterakan desa. Maka dari itu dibentuklah Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Pencapaian dari program-program yang ada tidak luput dari kinerja lembaga. Penilaian kinerja bukan semata untuk mengukur dan menilai sejauh mana hasil atau prestasi yang sedang dan telah dilakukan, tetapi juga sebagai evaluasi berkala agar kinerja suatu lembaga atau kelompok dapat lebih baik lagi kedepannya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kelembagaan LPHD di Desa Sukorejo.

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* terhadap pengurus LPHD dan KUPS yang berjumlah 45 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner berdasarkan empat aspek utama sesuai indikator Permen LHK No. 9 Tahun 2021, yaitu aspek administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Menggunakan skala pengukuran Guttman dan hasil data dianalisis menggunakan teknik uji data triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan LPHD Desa Sukorejo memiliki kinerja yang cukup baik dengan tingkat keterpenuhan indikator sebesar 75,7%. Aspek Administrasi merupakan aspek dengan perolehan bobot tertinggi dengan persentase 7% dari total bobot penilaian aspek administrasi sebesar 7%. Aspek Ekologi dengan persentase 17,5% dari total bobot penilaian aspek ekologi sebesar 24%. Aspek Sosial memperoleh nilai persentase 22,1% dari total bobot penilaian sebesar 31%. Aspek Ekonomi mendapatkan persentase 29,1% dari total bobot penilaian aspek ekonomi sebesar 38%. Meskipun begitu beberapa upaya dapat dilakukan seperti penguatan kapasitas kelembagaan LPHD, pengembangan usaha ekonomi produktif, pembentukan Masyarakat Peduli Api, dan peningkatan peran pendamping dalam pembinaan kelembagaan.